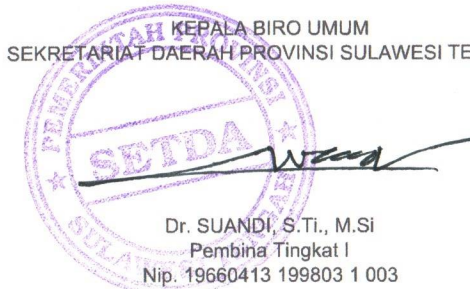


INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62	64	66	68	70,50
			Nilai SAKIP	Nilai	81	83	85	87	89
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	78	80	88,50	90	92
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	persentase pencapaian standarisasi sarana prasarana aparatur pemda	Persen	70	71	72	73	74
		Meningkatkan pelayanan kerumah tanggaan, administrasi keuangan dan aset, serta tata usaha sekretariat	Persentase layanan administrasi keuangan dan Aset Setda	Persen	100	100	100	100	100
			persentase layanan administrasi dan kerumahtanggaan pimpinan	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase laporan Keuangan dan Aset sekretariat daerah	Persen	100	100	100	100	100
		Meningkatkan layanan kedinasan dan urusan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan dan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah	Persen	100	100	100	100	100

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. SUANDI, S.Ti., M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19660413 199803 1 003



INDIKATOR KINERJA

BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH

Matriks Capaian IKU-IKK Provinsi Sulteng Tahun 2020-2023

PERANGKAT DAERAH : BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	CAPAIAN IKD/IKK SETIAP TAHUN				KETERANGAN
		2020	2021	2022	2023	
02:03:06	Kesekretariat Daerah	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				
2.3.6.1	Status Kinerja LPPD	-	-	-		MENUNGGU HASIL STATUS EVALUASI LPPD BELUM DISAMPAIKAN KEMENDAGRI
2.3.6.3	MoU (Perjanjian Kinerja)	12	23	40		TERCAPAINYA MOU ANTAR PEMERINTAH, BADAN USAHA/SWASTA
2.3.6.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70 Indeks	70 Indeks	88,56 Indeks		TERCAPAINYA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
2.3.6.6	Jumlah Kajian Akademik Persiapan DOB (Dokumen)	-	-	-		MORATORIUM DOB DARI PEMERINTAH PUSAT

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
 OTONOMI DAERAH

 Drs. DAHP... M.Si
 Kepala Muda
 NIP. 19803 1 017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021 - 2026**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULIR PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGUNG JAWAB
1.	SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Penataan keuangan dan Kinerja yang baik	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang dihasilkan	FORMULASI PERHITUNGAN Berdasarkan Jumlah Surat yang terdistribusikan dari Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ke seluruh OPD dan Lembaga Lainnya. Berdasarkan Jumlah Sarana dan Prasarana Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dipenuhi sesuai analisis Standar kebutuhan dan Standar Sarana Prasarana Pemerintah Daerah. Berdasarkan Belanja Modal APBD Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat di Realisasikan.	Biro administrasi Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. RENSTRA SEKERTARIAT PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021 s/d 2026	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN


Drs. ABDURRAUF MALIK, M.SI
 Pembina Tk. I
 Nip. 196910271989031006

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum Dan Ham		Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	83-85	86-88	89-91	92-94	95-97
		Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	Indeks	62	64	66	68	70,05
		Meningkatnya Pembangunan di Bidang Hukum	Rata-Rata Capaian Target Pembangunan Bidang Hukum Provinsi Sulawesi Tengah	Persen	75	80	85	90	100
		Meningkatnya Capaian RANHAM Provinsi Sulawesi Tengah	Nilai/Skor Rencana Aksi HAM Provinsi Sulawesi Tengah	Persen	75	80	85	90	100


 KEPALA BIRO HUKUM
ADIMAN, S.H., M.Si
 NIP. 19740610 200003 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BIRO PEREKONOMIAN

TAHUN 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 - 2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya perumusan dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah	Persentase Fasilltasi dan Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah	Jumlah Kebijakan yang difasilltasi dan koordinasi dibagi dengan Jumlah keseluruhan kebijakan dikali dengan 100%	Dokumen : RAKOR (Rapat Koordinasi Perekonomian)	Bagian Kebijakan Perekonomian
		Inflasi	Data / inflasi bersumber dari data BPS (Biro Perekonomian menganalisa data / angka inflasi untuk menjadi rumusan kebijakan pemerintah agar dapat mengendalikan inflasi / harga di daerah)	Laporan hasil TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)	
		Pengeluaran Perkapita			

Palu, 28 April 2023

Mengetahui,

**KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



KUSMARTO PASMAN, SH

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19720614 200312 1 009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2021-2026**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Koordinasi & Sinkronisasi Kelembagaan dalam Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Pengendalian kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Pengeluaran Perkapita	JUMLAH PENGELUARAN PER KAPITA SETAHUN	RPJMD 2021-2026, BPS.go.id	BAGIAN KESRA PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG
		Presentase Lembaga dan Yayasan Keagamaan yang terdaftar diKemenkumham yang diberikan bantuan	$\frac{\text{JUMLAH LEMBAGA DAN YAYASAN KEAGAMAAN YANG DIBERIKAN BANTUAN}}{\text{JUMLAH LEMBAGA DAN YAYASAN KEAGAMAAN YANG TERDAFTAR}} \times 100\%$	DATA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH, BIRO KESRA	BAGIAN MENTAL SPIRITUAL BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG
		Presentase Kelembagaan Rumah Ibadah yang diberikan bantuan	$\frac{\text{JUMLAH RUMAH IBADAH YANG DIBERIKAN BANTUAN}}{\text{JUMLAH RUMAH IBADAH YANG TERDAFTAR}} \times 100\%$	DATA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH, BIRO KESRA	BAGIAN MENTAL SPIRITUAL BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG
		Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar yang terfasilitasi	$\frac{\text{JUMLAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PELAYANAN DASAR YANG TERFASILITASI}}{\text{JUMLAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PELAYANAN DASAR YANG DIUSULKAN}} \times 100\%$	DATA BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG	BAGIAN KESRA PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG
		Persentase kebijakan dan program non pelayanan dasar yang terfasilitasi	$\frac{\text{JUMLAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM NON PELAYANAN DASAR YANG TERFASILITASI}}{\text{JUMLAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM NON PELAYANAN DASAR YANG DIUSULKAN}} \times 100\%$	DATA BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG	BAGIAN KESRA PELAYANAN DASAR DAN NON PELAYANAN DASAR BIRO KESRA SETDA PROV. SULTENG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2021-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA				
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Meningkatnya Konsumsi Perkapita	Meningkatnya Kualitas Koordinasi & Sinkronisasi Kelembagaan dalam Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan serta Pengendalian kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Pengeluaran Perkapita	1,121	1,166	1,21	1,255	1,299
		Meningkatnya kualitas lembaga dan yayasan keagamaan yang diberikan bantuan	Presentase Lembaga dan Yayasan Keagamaan yang terdaftar diKemenkumham yang diberikan bantuan	3%	3%	3%	4%	5%
		Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan, Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga Keagamaan	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		<i>Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual</i>	<i>Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi</i>	<i>150 Lembaga</i>	<i>170 Lembaga</i>	<i>200 Lembaga</i>	<i>250 Lembaga</i>	<i>300 Lembaga</i>
		Meningkatnya kualitas kelembagaan rumah ibadah yang diberikan bantuan	Presentase Kelembagaan Rumah Ibadah yang diberikan bantuan	8%	8%	8%	9%	10%
		Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Pengembangan Keagamaan, Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga Keagamaan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberian Bantuan Sarana Peribadatan serta Lembaga Keagamaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		<i>Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola</i>	<i>550 Unit</i>	<i>450 Unit</i>	<i>500 Unit</i>	<i>550 Unit</i>	<i>600 Unit</i>
		Meningkatnya kualitas kebijakan dan program pelayanan dasar yang terfasilitasi	Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar terkait Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
		<i>Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA				
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
		<i>Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		<i>Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Meningkatnya kualitas kebijakan dan program non pelayanan dasar yang terfasilitasi	Persentase kebijakan dan program non pelayanan dasar yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III	Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar terkait Non Pelayanan Dasar I, II dan III	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
		<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2021-2026

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan	Metodologi	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pengadaan Barang/Jasa	Level kematangan/maturasi Lembaga Pengadaan Barang/Jasa	$\frac{\text{Jumlah Variabel Terpenuhi}}{\text{Total Variabel}} \times 100$	Penilaian Maturitas PBJ Peningkatan level kematangan dari level 1 sampai level 5 oleh LKPP RI	Level kematangan/maturasi Lembaga Pengadaan Barang/Jasa didapatkan dari Pemenuhan 9 Indikator Level Kematangan/Maturasi PBJ	Penanggung Jawab Biro Pengadaan Barang/Jasa
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Evaluasi yang dilakukan KEMENPAN & RB	Penilaian yang dilakukan oleh KEMENPAN & RB	Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KEMENPAN & RB	
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Evaluasi yang dilakukan KEMENPAN & RB	Penilaian yang dilakukan oleh KEMENPAN & RB	Hasil Penilaian yang dilakukan oleh KEMENPAN & RB	

Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
 Sekretariat Daerah
 Provinsi Sulawesi Tengah



MUCHSIN HUSAIN PAKAYA, SE., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 Nip. 19680506 199603 1 003

LAMPIRAN I

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SULTENG 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Pengelolaan Data SKM	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	Bagian Kinerja & Pelayanan Publik
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, Dan Transparan)	Indeks Kematangan Organisasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi	Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
		Indeks Reformasi Birokrasi	Evaluasi yang dilakukan KEMENPAN&RB	Hasil LHE MENPAN&RB	Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
		Pesentase Jabatan ASN sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Jabatan \& Formasi Jabatan sesuai Kualifikasi \& kompetensi}}{\text{Total Jumlah Jabatan Administrasi}} \times 100\%$	Hasil Evaluasi Jabatan	Bagian Analisa dan Formasi Jabatan

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 - 2026

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya layanan keprotokolan, materi dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan administrasi kepegawaian	Tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan	Jumlah Acara/Kegiatan KDH/WKDH dikali Jumlah Acara yang diatur secara Protokoler X 100%	Hasil Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Keprotokolan berdasarkan Permen PAN & RB No 14 Tahun 2017	Bagian Protokol
		Tingkat kepuasan terhadap materi dan dokumentasi pimpinan	Jumlah Acara/Kegiatan KDH/WKDH dikali Jumlah Materi Pimpinan yang disiapkan X 100%	Hasil Survey Kepuasan terhadap Ketepatan waktu penyampaian materi dan substansi kepada pimpinan berdasarkan Permen PAN & RB No 14 Tahun 2017	Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase kualitas layanan kepegawaian lingkup sekretariat daerah	Jumlah usulan layanan kepegawaian dibagi jumlah usulan yang ditindak lanjuti X100 %	Dokumen Kepegawaian Sekretariat Daerah Prov. Sulteng	Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda
		Tingkat kualitas penyusunan dokumen perencanaan lingkup sekretariat daerah	Kualitas Dokumen : RENSTRA, RENJA, KAK Sekretariat Daerah Prov. Sulteng	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Setda

Palu, 2022
Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setda Prov. Sulteng

Eddy Nicolas Lesnusa, S.sos
Nip. 19720405 200012 1 002